

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENYITAAN
TERHADAP HARTA BENDA WAJIB PAJAK SEBAGAI
SALAH SATU UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**



Oleh

**RIO CANDRA SOEBHIYANTORO
NIM. 020710101168**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENYITAAN
TERHADAP HARTA BENDA WAJIB PAJAK SEBAGAI
SALAH SATU UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER**

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENYITAAN
TERHADAP HARTA BENDA WAJIB PAJAK SEBAGAI
SALAH SATU UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER**

Oleh

**RIO CANDRA SOEBHIYANTORO
NIM. 020710101168**

**Pembimbing,
I.G.A.N. DIRGHA,S.H.,M.S.
NIP. 130 532 005**

**Pembantu Pembimbing,
IDA BAGUS OKA ANA,S.H.,M.M.
NIP. 131 832 297**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

MOTTO

"Komunikasi adalah sesuatu yang sederhana dan sulit yang takkan bisa diungkapkan dengan kata-kata sederhana"

T.S. Matthews

Intisari, PT. Intisari Mediatama, Desember No. 437 1999:26

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan sebagai rasa hormat dan bangga kepada:

- 1. Papa Drs. Bambang Soebhiyantoro dan mama Erlina Kurniawati yang selalu memberikan doa, nasihat, motivasi dan kasih sayang serta pengorbanan yang tiada tara demi kebahagiaan dan keberhasilanku;**
- 2. Almamaterku Universitas Jember yang kuhormati dan kubanggakan.**

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis;

Tanggal : 15;

Bulan : Juni;

Tahun : 2006.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

KETUA,

SEKRETARIS,

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

ANTIKOWATI, S.H.,M.H

NIP. 131 759 757

ANGGOTA PENGUJI :

1. I.G.A.N. DIRGHA, S.H.,M.S.

NIP. 130 532 005

.....

2. IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M.

NIP. 131 832 297

.....

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENYITTAAN TERHADAP HARTA
BENDA WAJIB PAJAK SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER**

Oleh

RIO CANDRA SOEBHIYANTORO

NIM. 020710101168

Menyetujui :

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I.G.A.N. DIRGHA,S.H.,M.S.

NIP. 130532005

IDA BAGUS OKA ANA,S.H.,M.M.

NIP. 131832297

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **"STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENYITAPAN TERHADAP HARTA BENDA WAJIB PAJAK SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER"**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk itulah, penyusun mencurahkan segenap kemampuan, tenaga dan pikiran demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S. selaku Pembimbing dan selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dengan tulus ikhlas, sehingga penyusun merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Pembimbing dan selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Ketua Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia menguji skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S. U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I. Ketut Suandra S.H selaku Dosen Wali dan selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Asmara Budi Dyah Sutji, S.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya dibangku kuliah;
10. Kakakku Freddy Febriyanto Soebhiyantoro, S.T. & Indra Bagus Soebhiyantoro dan Adikku Mia Damayanti Soebhiyantoro yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
11. Om Bandi dan Tante Yayuk yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
12. Teman Terdekatku, Ira Kusuma Prameswari yang tiada hentinya dan tulus dalam memberikan semangat, do'a, dukungan dan kebahagiaan;
13. Sahabat-sahabatku Gepenk, Yudis, Bonzu, Imam, Hendy, Nick, Ricky, Azis, Ema, Dessy, Erina, Dewi, Krisna, Denny, Hendra dan seluruh teman-teman kelas B2 angkatan 2002 yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan secara keseluruhan, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Jember, 15 Juni 2006

Rio Candra Soebhiyantoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.2.1 Sumber Data Primer	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisis Data	6

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Pajak	11
2.3.2 Hukum Pajak	14
2.3.3 Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak	16
2.3.4 Perlawanan Pajak	17
2.3.5 Penagihan Pajak	19
2.3.6 Hak Mendahulu Pajak (Preferensi)	21

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Sebab-sebab Timbulnya Utang Pajak	22
3.2 Pelaksanaan Penyitaan Terhadap Harta Benda Wajib Pajak Sebagai Salah Satu Upaya Pencairan Tunggalan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jember	25
3.3 Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penyitaan Terhadap Harta Benda Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jember	36

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40

DAFTAR PUSTAKA	41 .
-----------------------------	-------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SURAT IJIN PENELITIAN
- Lampiran II : SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN
PENELITIAN
- Lampiran III : SURAT TEGURAN
- Lampiran IV : SURAT PAKSA
- Lampiran V : BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA
- Lampiran VI : LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
- Lampiran VII : SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
- Lampiran VIII : BERITA ACARA PENYITAAN
- Lampiran IX : SEGEL/TANDA PENYITAAN
- Lampiran X : LAPORAN PERKEMBANGAN TUNGGAKAN PAJAK
s/d DESEMBER 2005
- Lampiran XI : LAPORAN KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN
2005

RINGKASAN

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilakukan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan sistem yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih sangat banyak ditemui adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian.

Salah satu faktor pendukung demi tercapainya keberhasilan tugas Kantor Pelayanan Pajak adalah "pelayanan". Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai wajib pajak, diharapkan akan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya maka pemerintah memasukkan peraturan tentang pelaksanaan penyitaan ke dalam Undang-undang Perpajakan.

Salah satu usaha untuk menghindari penunggakan pembayaran pajak adalah dengan penagihan paksa karena dengan adanya tindakan ini akan dapat menegakkan wibawa pemerintah khususnya aparat pajak. Apabila dengan surat paksa ini wajib pajak masih belum juga melaksanakan kewajibannya maka akan dilaksanakan penyitaan terhadap barang-barang wajib pajak sebagai salah satu upaya pencairan tunggakan pajaknya. Karena apabila sampai tidak dilunasi akan

berakibat menjadi utang pemerintah terhadap masyarakat dan akan dirasakan sebagai ketidakadilan bagi wajib pajak yang lain.

Berdasarkan pada data-data yang ada ternyata dapat dilihat bahwa peranan penyitaan sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Dengan melihat jumlah tunggakan pajak yang belum dapat dicairkan pada setiap akhir triwulan, akan memberikan gambaran bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Jember masih belum dapat melaksanakan proses penyitaan sebagaimana yang diinginkan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyitaan banyak terdapat kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut terbagi menjadi dua yakni kendala intern dan kendala ekstern.

Dilain pihak penerimaan negara di sektor perpajakan memang semakin meningkat, walaupun disana-sini masih banyak terjadi kekurangan bahkan dirasakan adanya hambatan-hambatan sehingga penerimaan pajak menjadi tidak lancar. Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka pelaksanaan penyitaan sebagai salah satu upaya pencairan tunggakan pajak dengan segala kekurangan dan dengan bermacam-macam hambatannya, hendaknya dapat dipergunakan sebagai alat pemacu untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Penyusun